

Perjalanan panjang pendidikan luar sekolah di Indonesia: analisis sejarah dan relevansinya masa kini

Zahra Lahitania

Program studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220101110067@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pendidikan Luar Sekolah,
Sejarah Pendidikan,
Pendidikan Sepanjang Hayat

Keywords:

Non-Formal Educationion,
Educational History, Lifelong
Learning

ABSTRAK

Pendidikan luar sekolah di Indonesia memiliki perjalanan sejarah yang panjang, seiring dengan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Sejak masa kolonial, pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai wadah pembelajaran alternatif di luar jalur formal yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Perkembangannya terus mengalami perubahan signifikan pada masa kemerdekaan, Orde Baru, hingga era Reformasi, dengan fokus pada peningkatan keterampilan, literasi, dan penguatan karakter bangsa. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejarah perkembangan pendidikan luar sekolah di Indonesia serta menelaah relevansinya dalam konteks kekinian. Hasil analisis

menunjukkan bahwa pendidikan luar sekolah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat, pengentasan buta huruf, serta pemberdayaan masyarakat. Relevansi pendidikan luar sekolah tetap aktual di era modern, terutama dalam menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat terhadap pembelajaran fleksibel.

ABSTRACT

Non-formal education in Indonesia has undergone a long historical journey, shaped by the nation's social, political, and cultural dynamics. Since the colonial era, non-formal education has served as an alternative learning pathway outside the formal system, contributing to community empowerment. Its development has experienced significant transformations during the independence period, the New Order, and the Reform era, focusing on skills improvement, literacy, and character building. This study aims to analyze the historical development of non-formal education in Indonesia and examine its relevance in the present context. The findings indicate that non-formal education plays an essential role in supporting lifelong learning, eradicating illiteracy, and empowering communities. Its relevance remains significant in the modern era, particularly in addressing the challenges of globalization, technological advancement, and the demand for flexible learning opportunities.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia yang tidak hanya diperoleh melalui jalur sekolah formal, tetapi juga dapat berlangsung di luar sekolah. Seiring dengan perkembangan zaman, pendidikan luar sekolah (PLS) hadir sebagai solusi atas keterbatasan pendidikan formal yang belum mampu merata menjangkau seluruh masyarakat. Dari perspektif historis, lahirnya pendidikan luar sekolah berawal dari kesadaran bahwa kegiatan belajar merupakan proses sepanjang hayat (*lifelong education*), yang tidak dibatasi oleh usia, tempat, maupun jenjang pendidikan. Sejarah PLS di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan usaha bangsa dalam memperluas akses pendidikan, terutama pada masa pra dan pasca kemerdekaan. Pada masa



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penjajahan, kesempatan memperoleh pendidikan formal sangat terbatas dan cenderung diskriminatif, sehingga masyarakat mengembangkan bentuk pendidikan nonformal seperti pengajian, surau, pesantren, serta kursus keterampilan.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyadari urgensi pendidikan nonformal sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, penanggulangan buta huruf, serta peningkatan keterampilan hidup. Dalam perkembangannya, pendidikan luar sekolah menjadi jalur alternatif yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai program, seperti Kejar Paket A, B, dan C, kursus keterampilan, pelatihan kerja, hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, mempelajari sejarah pendidikan luar sekolah memiliki arti penting untuk memahami landasan perkembangannya, perannya dalam pembangunan bangsa, serta relevansinya terhadap tantangan pendidikan pada masa sekarang

Pembahasan

Perkembangan Pendidikan Luar Sekolah di dunia

Sejarah menunjukkan bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan suatu bangsa bukan kekayaan alam yang dimilikinya, melainkan kualitas sumber daya manusianya. Negara-negara yang kuat dalam kualitas sumber daya manusianya muncul sebagai negara unggul meskipun mungkin hanya memiliki sumberdaya alam yang sangat terbatas. Melihat sedemikian penting peranan pendidikan, kemunculan pendidikan luar sekolah dapat dipandang sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsep awal dari Pendidikan luar sekolah ini muncul sekitar akhir tahun 60-an hingga awal tahun 70-an dalam bukunya Philip Coombs dan Manzoor A., P.H. (1985) *The World Crisis In Education* (Sudarsana, 2016).

Kehadiran pendidikan luar sekolah marak di awal-awal tahun 1970-an terutama disebabkan oleh adanya kebutuhan akan pendidikan yang begitu luas terutama di negara-negara berkembang. Meluasnya kebutuhan akan pendidikan tidak terimbangi dengan ketersediaan akses pendidikan yang layak, hal ini disebabkan adanya kegagalan pendidikan formal. Hal tersebut membuat pendidikan formal mengalami kegagalan logistik dan fungsi sehingga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang begitu besar dan cepat maka munculah sistem pendidikan alternatif di luar pendidikan formal. Kehadiran pendidikan luar sekolah adalah untuk menjawab tantangan kehidupan yang bertambah kompleks, dimana dituntut pengembangan kualitas sumber daya manusia yang mampu mandiri. Pendidikan luar sekolah sebagai sebuah bagian dari sistem pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam rangka pelayanan pendidikan sepanjang hayat, yang sangat dibutuhkan saat ini dan ke depan. Pendidikan luar sekolah dianggap sebagai pendidikan yang mampu memberikan jalan serta pemecahan bagi persoalan-persoalan layanan pendidikan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Dimana hal tersebut dalam konteks sosio-ekonomi bagi individu dari suatu program pendidikan (termasuk pendidikan luar sekolah) adalah memberikan kebermanfaatan atau perbaikan dari segi penghasilan, produktivitas,

kesehatan dan partisipasi (Abtokhi et al., 2025).

Adanya organisasi UNESCO yang merupakan singkatan dari Unite Nations Educational Scientific And Cultural Organisasi yang artinya organisasi Pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan perserikatan bangsa-bangsa. Didirikan pada 16 November 1945 di London setelah perang Dunia II. Adanya UNESCO karena konferensi PBB di London, sejak tanggal 1 sampai 16 November 1945. Waktu itu terdapat 44 Negara ikut hadir dalam konverensi. Pada tanggal terakhir konverensi UNESCO kemudian di tandatangani. Dengan tujuan utama membangun perdamaian abadi melalui Pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya (Hairani, 2018). UNESCO bertekad menjamin tersedianya Pendidikan yang merata dan bermutu bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan, serta berperan aktif dalam Upaya pemberantasan buta huruf diberbagai megara (Pribadi, 2017). UNESCO mengungsung lima program kerja utama dalam mewujudkan tujuan utamanya, di antaranya program-program tersebut berada di dalam lingkup Pendidikan, ilmu kealaman, ilmu sosial, manusia, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi. Salah satu kebijakan Internasional melalui UNESCO adalah konsep *longlife learning* yang merupakan pendidikan sepanjang hayat.

Pembelajaran seumur hidup manambah penerimaan dalam bersosialisasi, hidup bernegara dan aktualisasi diri, serta daya saing dan kemampuan kerja. Dalam penelitiannya berkaitan dengan pembelajaran seumur hidup formal. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip desain yang disarankan mengatasi situasi di mana pembelajaran dapat dinilai. Namun, kami menyadari bahwa pembelajaran sepanjang hayat juga bisa bersifat nonformal atau informal. Artinya belajar dapat didasarkan pada pengalaman hidup dan juga pada kegiatan yang belum ditetapkan sebagai pembelajaran (Fatimah & Prihantini, 2023). Dalam konteks era merdeka belajar saat ini, konsep *lifelong learning* menjadi semakin relevan dan aplikatif. hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menegaskan bahwa proses belajar tidak mengenal batas, sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa dibatasi oleh usia.

Lifelong learning merupakan kerangka konseptual yang melekat pada pendidikan luar sekolah dan telah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional (AF et al., 2022). Konsep belajar sepanjang hayat tidak hanya diposisikan sebagai teori, tetapi juga diimplementasikan melalui berbagai program pendidikan baik formal maupun nonformal, yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mendukung pengembangan spiritual, intelektual, dan sosial. Secara substansial, pendidikan sepanjang hayat dapat berlangsung di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Hal ini mencakup proses pengembangan potensi manusia yang tidak hanya ditempuh melalui lembaga pendidikan formal, melainkan juga melalui pengalaman hidup sehari-hari. Pemerintah Indonesia pun telah mengatur dasar hukum mengenai pendidikan sepanjang hayat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pentingnya pembentukan *learning society* atau masyarakat pembelajar. Dengan demikian, pendidikan sesungguhnya merupakan sebuah proses yang bersifat kontinu, tidak berhenti dalam kurun waktu tertentu. Dari sinilah lahir konsep *lifelong learning* yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas belajar yang dilakukan manusia, baik dalam konteks akademik maupun nonakademik, merupakan bagian dari perjalanan pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) merupakan padanan istilah dari social education yang keberadaannya tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin pesat turut mendorong lahirnya beragam bentuk pendidikan dalam kelompok maupun masyarakat. Bahkan, sebelum sistem pendidikan formal hadir, manusia sejatinya telah terlebih dahulu menjalankan proses pendidikan melalui interaksi di lingkungan sosialnya (Mubarak & Mubarak, 2024). Dalam konteks ini, pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai pelengkap, penambah, sekaligus pengganti pendidikan formal, khususnya bagi individu yang tidak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di jalur sekolah. Implementasinya dapat ditemui dalam bentuk kursus keterampilan, pelatihan kerja, penyuluhan kesehatan, program pemberantasan buta huruf, hingga kegiatan keagamaan dan kebudayaan masyarakat. Kehadiran pendidikan luar sekolah menjadikan proses pendidikan lebih inklusif, kontekstual, dan selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian, PLS tidak hanya menutup celah yang belum dijangkau oleh pendidikan formal, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Muliya, 2022).

Secara yuridis, jalur pendidikan nonformal dan informal telah diakui sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV pasal 10 ayat 1. Suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai pendidikan luar sekolah apabila diselenggarakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan berfungsi mendukung terwujudnya pendidikan sepanjang hayat (Adelia Putri et al., 2024). Adapun perjalanan sejarah PLS di Indonesia mengalami dinamika yang panjang, mulai dari masa pra-kemerdekaan, periode kemerdekaan, era Orde Baru, hingga Reformasi dan perkembangan kontemporer saat ini. Perjalanan sejarah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan luar sekolah senantiasa hadir sebagai bentuk respons terhadap tuntutan zaman sekaligus kebutuhan masyarakat.

Masa Pra- Kemerdekaan

Eksistensi pendidikan luar sekolah di Indonesia sejatinya telah hadir jauh sebelum bangsa ini meraih kemerdekaan. Aktivitas pendidikan tersebut telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat bahkan sebelum sistem persekolahan lahir dan berkembang secara formal. Dengan demikian, pendidikan nonformal bukanlah fenomena baru, melainkan telah lama melekat dalam budaya serta praktik interaksi sosial masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa setiap warga, tanpa memandang usia, gender, suku, agama, maupun latar belakang sosial-budaya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hayat (Mirza, 2025).

Pada awal kemunculannya, pendidikan luar sekolah dikenal dengan istilah pendidikan nonformal, pendidikan rakyat, atau pendidikan masyarakat. Pada masa kolonial Belanda, kebutuhan akan tenaga kerja terampil menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya pendidikan nonformal. Pemerintah kolonial membutuhkan sumber daya manusia yang mampu menunjang pembangunan infrastruktur, seperti gedung perkantoran, rumah dinas pejabat, serta fasilitas pemerintahan lainnya. Perkembangan

sektor usaha yang semakin pesat di Hindia Belanda menuntut hadirnya pekerja dengan keterampilan teknis tertentu.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemuda pribumi yang memiliki kemampuan dasar kemudian direkrut dan didaftarkan dalam berbagai kursus keterampilan sesuai bidang yang diperlukan. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka langsung ditempatkan pada proyek-proyek pembangunan yang telah ditentukan. Kondisi ini menjadi cikal bakal tumbuhnya kursus-kursus keterampilan di Indonesia, sekaligus menandai awal lahirnya pendidikan nonformal di tanah air. Seiring perjalanan waktu, peran pendidikan nonformal meluas, tidak hanya terbatas pada penyediaan tenaga kerja bagi kepentingan kolonial, tetapi juga berfungsi sebagai wahana masyarakat dalam memperoleh keterampilan hidup (life skills) serta memperkuat identitas budaya bangsa. PLS hadir sebagai jalur pendidikan alternatif di luar sekolah formal, terutama bagi masyarakat yang tidak memperoleh akses ke sekolah kolonial yang bersifat diskriminatif (Nasution et al., 2023). Praktiknya dapat ditelusuri dalam berbagai bentuk, seperti kursus keterampilan, pelatihan kerja, pemberantasan buta huruf, hingga pembelajaran berbasis komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, pendidikan nonformal tidak hanya berfungsi sebagai strategi bertahan hidup pada masa kolonial, tetapi juga sebagai sarana membangun kemandirian, memberdayakan rakyat, serta menopang keberlangsungan pendidikan sepanjang hayat.

Masa Pasca-Kemerdekaan

Pasca Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi tantangan besar, tidak hanya dalam mempertahankan kedaulatan dari ancaman penjajahan yang berusaha kembali berkuasa, tetapi juga dalam upaya mencerdaskan kehidupan rakyat yang sebagian besar masih tertinggal dalam hal pendidikan. Karena akses pendidikan formal belum sepenuhnya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka pendidikan nonformal dan informal hadir sebagai solusi strategis. Kehadirannya tidak sekadar menjadi alternatif, melainkan sarana pemberdayaan rakyat agar memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran kebangsaan yang diperlukan dalam membangun kehidupan pasca-kemerdekaan. Dengan demikian, pendidikan nonformal pada periode awal kemerdekaan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, menanamkan nilai persatuan, kemandirian, dan nasionalisme sebagai fondasi untuk mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Bentuk penyelenggaraan pendidikan nonformal pada masa itu diwujudkan melalui berbagai kegiatan masyarakat, di antaranya (Nasution et al., 2023):

Pemberantasan buta huruf

Sejak akhir tahun 1945, gerakan pemberantasan buta huruf dilaksanakan secara masif dengan semangat tinggi melalui semboyan "*perang melawan buta huruf*". Slogan ini berhasil membangkitkan kesadaran rakyat bahwa kemampuan membaca dan menulis merupakan modal penting untuk mengangkat martabat bangsa sejajar dengan bangsa lain.

School broadcasting

Pada tahun 1951, pemerintah menyelenggarakan program *school broadcasting* di bawah pimpinan Sadaryoen Siswomartoyo. Melalui siaran radio, pengetahuan dapat disebarkan secara luas, bahkan ke daerah-daerah yang sulit dijangkau tenaga pendidik, sehingga memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan.

Kursus kewarganegaraan

Sejak tahun 1956, kursus kewarganegaraan berkembang di berbagai daerah yang menjadi basis perjuangan rakyat. Program ini bertujuan menanamkan semangat nasionalisme, kesadaran politik, serta tanggung jawab warga negara baru dalam Kursus ini dirancang bagi kaum perempuan, dengan fokus pada keterampilan praktis, kesehatan keluarga, peningkatan gizi, serta pencegahan penyakit menular. Program ini memperkuat peran perempuan sebagai penggerak kesejahteraan keluarga sekaligus pendukung pembangunan masyarakat.

Kursus kependuan

Gerakan kependuan menjadi sarana pendidikan karakter bagi generasi muda. Selain melatih keterampilan fisik dan kepemimpinan, program ini menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta semangat kebangsaan sehingga pemuda siap menjadi garda terdepan dalam mempertahankan kemerdekaan.

Taman Pustaka Rakyat

Pendirian taman bacaan rakyat menjadi langkah strategis dalam memperluas wawasan masyarakat. Melalui fasilitas ini, rakyat memperoleh kesempatan belajar mandiri, sekaligus menumbuhkan kesadaran bahwa pengetahuan merupakan kunci penting dalam membangun masa depan yang lebih maju dan sejahtera. Program-program tersebut dirancang tidak hanya untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, tetapi juga untuk menciptakan peluang kerja baru, meningkatkan keterampilan masyarakat, serta mendorong partisipasi produktif dalam pembangunan bangsa. Dengan demikian, pendidikan nonformal pasca-kemerdekaan tidak hanya berperan sebagai pelengkap jalur formal, melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, sarana memperluas wawasan, memperkuat persatuan nasional, dan menyiapkan rakyat menghadapi dinamika zaman (Engking et al., 2012).

Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada masa Orde Baru, arah pembangunan Indonesia difokuskan pada tercapainya stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi sebagai fondasi pembangunan nasional. Dalam kerangka tersebut, pemerintah berupaya mencetak sumber daya manusia yang disiplin, terampil, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan. Walaupun pendidikan nonformal telah dijalankan sejak awal, legitimasi hukum baru diperoleh pada tahun 1989 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kehadiran regulasi ini menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada jalur formal, tetapi juga meliputi jalur nonformal dan informal. Dengan demikian, Pendidikan Luar Sekolah (PLS) diposisikan sebagai jalur alternatif yang berfungsi memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, khususnya bagi kelompok yang tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menempuh pendidikan formal.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan pada dekade 1970-an, kebutuhan terhadap jalur nonformal semakin mendesak (Cahyaningsih, 2016). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya tampung pendidikan formal dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih banyak menghadapi hambatan. PLS pun diarahkan untuk menjawab persoalan mendasar seperti tingginya angka buta huruf, rendahnya partisipasi pada pendidikan dasar, serta fenomena anak putus sekolah akibat keterbatasan biaya maupun akses geografis. Pemerintah kemudian merancang berbagai program strategis, antara lain pendidikan keaksaraan fungsional, program kesetaraan Paket A, B, dan C, serta pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai lembaga pendidikan nonformal berbasis komunitas (Hasibuan et al., 2023).

Program Kejar Paket A, B, dan C

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah oleh Masyarakat, pemerintah mengimplementasikan program kejar paket A, B, dan C sebagai upaya menanggulangi tingginya angka buta huruf. Kondisi demografis menunjukkan bahwa sekitar 71% penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan, sementara akses pendidikan masih terbatas. Faktor sosial-ekonomi turut memperburuk keadaan, karena banyak keluarga yang lebih mengutamakan kebutuhan ekonomi dibandingkan pendidikan, sehingga mendorong tingginya angka putus sekolah (Wulandari & Sumarno, 2013). Melalui kejar paket, masyarakat dari berbagai kelompok usia, termasuk orang dewasa di atas 25 tahun, memperoleh kesempatan untuk belajar kembali dalam sistem setara dengan pendidikan formal. Program ini berperan penting dalam pemerataan kesempatan belajar sekaligus pemberantasan buta huruf secara sistematis.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

PKBM merupakan lembaga pendidikan nonformal yang lahir untuk menjawab kebutuhan belajar masyarakat secara langsung dengan prinsip berbasis komunitas. Program yang dijalankan disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Fungsi PKBM tidak hanya menyediakan layanan pendidikan keaksaraan, tetapi juga pelatihan keterampilan praktis seperti kursus menjahit, pelatihan usaha kecil, penyuluhan kesehatan, hingga kegiatan sosial yang mendukung kemandirian ekonomi warga. PKBM berfungsi sekaligus sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, ruang belajar bersama, sarana penguatan jejaring sosial, serta wadah pengembangan potensi lokal. Dengan model pembelajaran yang fleksibel dan adaptif, PKBM mampu menjangkau kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dari akses pendidikan, mulai dari anak putus sekolah, ibu rumah tangga, hingga masyarakat dewasa. Oleh karena itu, PKBM dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerataan pendidikan serta pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Dengan adanya program kesetaraan dan PKBM, pendidikan nonformal pada masa Orde Baru tidak hanya sekadar pelengkap, tetapi juga berfungsi sebagai sarana strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pemerataan kesempatan belajar, serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam konteks pendidikan Akidah Akhlak, kesuksesan seorang guru pendidikan agama Islam dapat diukur dari kemampuannya dalam memenuhi tugas-tugas pendidikan. Hal ini dapat dicapai dengan memiliki kompetensi personal-religius, kompetensi sosial-religius, dan kompetensi profesional-religius. Penggunaan kata "religius" dalam setiap kompetensi menunjukkan kesetiaan guru terhadap prinsip-prinsip Islam sebagai panduan utama dalam menghadapi, mempertimbangkan, dan menyelesaikan masalah pendidikan, serta dalam menempatkan segala hal dalam konteks keislaman (Hasibuan et al., 2023).

Masa Reformasi Hingga Era Kontemporer

Pasca runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, sistem pendidikan Indonesia memasuki fase baru yang ditandai dengan kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Perubahan mendasar tersebut juga memberikan dampak signifikan terhadap arah perkembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). PLS tidak lagi diposisikan sekadar sebagai program pelengkap pemerintah, melainkan bertransformasi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan manusia sepanjang hayat. Dengan paradigma baru ini, PLS berkembang ke arah yang lebih inklusif, partisipatif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pendidikan Berbasis Masyarakat

Pada era Reformasi, pendidikan nonformal semakin menegaskan identitasnya sebagai pendidikan berbasis komunitas. Jika pada masa sebelumnya penyelenggaraan PLS cenderung birokratis dan terpusat, kini peran masyarakat menjadi semakin dominan. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tumbuh menjadi lembaga yang mandiri dan adaptif, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dunia usaha, maupun pemerintah daerah. Orientasi PLS juga mengalami perluasan. Tidak hanya berfokus pada penanganan masalah anak putus sekolah, melainkan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui program kewirausahaan, pendidikan perempuan, pendidikan lingkungan hidup, hingga kursus teknologi untuk menjawab tuntutan era digital. Dengan demikian, PLS berkembang sebagai arena pemberdayaan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat (Masduki, 2019).

Kesetaraan Pendidikan

Salah satu pencapaian penting pada era ini adalah semakin kuatnya pengakuan terhadap kesetaraan antara jalur pendidikan formal dan nonformal. Program kesetaraan Paket A, B, dan C memperoleh legitimasi hukum yang jelas. Ijazah yang diterbitkan dari jalur nonformal diakui setara dengan ijazah sekolah formal, sehingga lulusan Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA) memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Hal ini menandai pelembagaan PLS dalam sistem pendidikan nasional, sehingga jalur nonformal tidak lagi dipandang sebagai pilihan "kelas dua," melainkan sebagai alternatif resmi yang sah, memiliki legitimasi, serta mampu memperluas akses pendidikan sekaligus mengurangi stigma

sosial terhadap pendidikan nonformal (Wulandari & Sumarno, 2013).

Digitalisasi Pendidikan Luar Sekolah

Transformasi besar berikutnya terjadi dengan hadirnya era digital yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan nonformal. PLS tidak lagi terbatas pada pembelajaran konvensional tatap muka, melainkan bergerak menuju model berbasis teknologi informasi. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi berbagai platform digital, seperti Sahabat Rumah Belajar, Massive Open Online Courses (MOOC), TV Edukasi, hingga Learning Management System (LMS) untuk mendukung kegiatan PKBM. Selain itu, banyak PKBM secara mandiri memanfaatkan aplikasi populer seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, dan media sosial lain sebagai sarana pembelajaran. Kehadiran teknologi menjadikan PLS lebih fleksibel, mampu menjangkau peserta didik lintas latar belakang dan wilayah. Pandemi COVID-19 mempercepat proses digitalisasi ini, sekaligus membuktikan bahwa pendidikan nonformal adaptif terhadap perkembangan teknologi serta mampu memperluas akses belajar bagi seluruh lapisan masyarakat (Isbianti et al., 2021).

Kesimpulan dan Saran

Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Sejak masa kolonial, PLS hadir dalam berbagai bentuk seperti kursus keterampilan, pengajian, dan pesantren, yang ditujukan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal. Pasca-kemerdekaan, perannya semakin menonjol melalui program pemberantasan buta huruf, penanaman nasionalisme, dan peningkatan keterampilan hidup. Pada masa Orde Baru, PLS memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yang menegaskan kedudukannya sejajar dengan pendidikan formal, serta melahirkan program kejar Paket A, B, C dan pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai wadah pemerataan kesempatan belajar.

Memasuki era Reformasi hingga saat ini, PLS berkembang menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Orientasinya tidak hanya menyasar persoalan putus sekolah, tetapi juga pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan, pendidikan perempuan, dan kursus berbasis teknologi. Kesetaraan ijazah Paket A, B, C dengan jalur formal memperkuat legitimasi PLS dalam sistem pendidikan nasional. Transformasi digital juga semakin memperluas akses pembelajaran, khususnya melalui platform daring dan aplikasi digital, sehingga PLS mampu beradaptasi dengan tuntutan globalisasi dan tetap relevan sebagai jalur pendidikan sepanjang hayat.

Daftar Pustaka

Abtokhi, A., Maimun, A., Mulyanto, A. D., Mustikawan, A., Sholahuddin, M., Mulyono, A., Hartanti, O. E., Nofiantoro, U., & Mustofa, S. (2025). Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan dan Keberhasilan Pendampingan BLK Komunitas Menjadi Inkubator Wirausaha di Wilayah Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)*, 6(2),

84–92. <https://doi.org/10.18860/jrce.v6i2.29364>

- Adelia Putri, Putri Wulandari Nasution, Syarah Syarif, & Gusmaneli Gusmaneli. (2024). Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 221–227. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v2i2.194>
- AF, M. A., Nurfadilah, K., & Hilman, C. (2022). Pendidikan Luar Sekolah dalam Kerangka Pendidikan Sepanjang Hayat. *Jurnal Inovasi, Evaluasi Dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, 2(2), 90–95. <https://doi.org/10.54371/jiepp.v2i2.216>
- Cahyaningsih, G. D. (2016). Latar Belakang Wajib Belajar Masa Orde Baru Tahun 1984 Galuh Dewi Cahyaningsih. *Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 979–989.
- Engking, H., Hasan, S., Direktur, M. P., Stkip, P., Bandung, S., Nurhayati, S., Pd, S., Pd, M., & Stkip, D. (2012). Pendidikan Luar Sekolah Dan Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah STKIP Siliwangi Bandung*, 1(1), 1–12. <http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/02/>
- Fatimah, A., & Prihantini, P. (2023). Menata Masa Depan Indonesia Emas 2045 Dalam Bingkai Lifelong Learning Dan Universal Education. *Jurnal Ilmiah PENDAS: Primary Educational Journal*, 4(2), 170–178. <https://doi.org/10.29303/pendas.v4i2.3651>
- Hairani, E. (2018). *Abstrak*. 2(1), 355–377.
- Hasibuan, M., Siregar, C. Z. P., Zanisti, H., & Siregar, Y. N. (2023). Peran Pendidikan Luar Sekolah Dalam Mewujudkan Pkbn Yang Efektif, Efisien Dan Produktif. *Pema (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 41–49. <https://doi.org/10.56832/pema.v1i2.90>
- Isbianti, P., Arbaatun, L. N., Bintang, E., Nur Cahyaning, D., & Chanabillah, N. (2021). Pendampingan Digitalisasi Arsip Melalui Metode In – On – In untuk Meningkatkan Kemampuan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) dalam Pelestarian Arsip. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5(2), 191–201. <https://doi.org/10.21831/diklus.v5i2.43597>
- Masduki, M. (2019). Pendidikan Berbasis Masyarakat Dalam Pendidikan Islam. *Qalamuna*, 11(2), 111–123.
- Mirza, I. (2025). *Tafsir Ayat-Ayat Tentang Pendidikan*. 2(1), 86–91.
- Mubarak, R., & Mubarak, A. Z. (2024). Peran Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Moderasi Beragama Pada Sisa Madrasah Aliyah Bilingual Kota Batu. *EduMasa: Journal of Islamic Education*, 2(1), 1–13.
- Muliya, A. P. (2022). Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah. *IBERS: Jurnal Pendidikan Indonesia Bermutu*, 1(1), 8–18. <https://doi.org/10.61648/ibers.v1i1.8>
- Nasution, T., Siregar, A. R., Tumanggor, E. R., Muhammad, M., & Jannah, R. (2023). Sejarah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Indonesia. *MUDABBIR Journal Reserch and Education Studies*, 1(2), 38–51. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v1i2.74>
- Pribadi, R. (2017). *Memupuk Kesuburan Menebar Kemakmuran*. PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Sudarsana, I. K. (2016). Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upayapembangunan Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.25078/jpm.v1i1.34>
- Wulandari, I., & Sumarno. (2013). Program Kejar Paket A dalam Pemberantasan Buta Huruf Tahun 1974-1979. *Avatara*, 1(2), 215–220. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/2389/5522>